

## PENGARUH GAYA MENGAJAR GURU TERHADAP ANTUSIASME BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQHI DI MAN 1 PALU

Zulfadli Zulfadli<sup>1\*</sup>, Sagaf S. Pettalongi<sup>2</sup> & Mohamad Idhan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Zulfadli, E-mail: [zulfadli.npwp@gmail.com](mailto:zulfadli.npwp@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

### ABSTRAK

Volume: 2

### KATAKUNCI

Kebijakan, Kepala Madrasah,  
Mutu Pendidikan

Artikel ini membahas tentang manajemen Kebijakan Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam Arikel ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang mengungkapkan, menemukan dan menggali informasi tentang manajemen Kebijakan Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian menemukan bahwa Kebijakan yang dibuat seorang pemimpin dalam lembaga pendidikan adalah faktor terpenting demi tercapainya tujuan pendidikan. Kebijakan kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah. tidak akan terlepas dari tiga unsur pendidikan yaitu, input, proses, dan lulusan. Untuk mencapai hal itu kepala madrasah harus memilki strategi atau Langkah dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Serta Kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan harus mempunyai sikap yang loyalitas, integritas, dan komitmen untuk mencapai mutu pendidikan

### 1. Pendahuluan

Kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan harus dapat mengenal dan mengerti berbagai kedudukan, keadaan dan apa yang diinginkan baik oleh guru maupun pegawai tata usaha serta pembantu lainnya. Sehingga dengan adanya kerjasama yang baik dapat menghasilkan pikiran yang harmonis dalam usaha perbaikan madrasah. Kepala madrasah merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan madrasah, yang akan menentukan bagaimana tujuan madrasah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Kepala madrasah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektifitas kinerja sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan (Hidayat & Machali, 2018; Manap, 2013). Mutu pendidikan bukanlah suatu yang berdiri sendiri tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan terkait sebagai suatu proses dalam sebuah sistem, bila membicarakan masalah mutu pendidikan maka tidak akan terlepas dari tiga unsur pendidikan yaitu, input, proses, dan lulusan (Amin, Arsil, Fathurrochman, Bahri, & Rahmaningsih, 2019; Pretorius & Macaulay, 2019; Ristianti, Danim, Winarto, & Dharmayana, 2019).

Dalam Undang-Undang 1945 pasal 31 : Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Landasan konstitusional komitmen pendidikan inilah yang membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia untuk berbuat baik bagi sistem pendidikan nasional melalui berbagai kebijakan bidang pemerintahan dan pembangunan, termasuk kebijakan otonomi daerah. Kepala madrasah harus mampu melahirkan gagasan inovatif yang berguna untuk menghasilkan alternatif kebijakan dalam membangun (Hidayat & Machali, 2018). Sistem pendidikan yang efisien, bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Program Studi MPI UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-2 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

lembaga pendidikan merupakan sumber daya manusia yang menjadi subjek dan objek pembangunan yang perlu ditingkatkan mutunya melalui jalur pendidikan dalam fungsi, proses, dan aktifitasnya yang bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan nasional

Artikel ini diharapkan dapat menambah literature dan ilmu pengetahuan tentang manajemen kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat dijadikan sebagai konsep, langkah/strategi dalam proses dalam mengembangkan potensi untuk berkembang sebagai lembaga pendidikan yang bermutu dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Kebijakan Pendidikan**

Dunia pendidikan tidak bisa hidup tanpa kebijakan, kebijakan dapat dirumuskan oleh instansi pemerintah atau madrasah itu sendiri. Kebijakan adalah prinsip yang mengatur semua perilaku untuk memandu tujuan tertentu (Asmoni, 2018: 13). Menurut Rusdiana, (2015: 32) kebijakan diartikan sebagai seperangkat aturan yang dirumuskan oleh pemerintah untuk berupaya membentuk sistem pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita bersama membangun negara. Selain itu, kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai segala proses serta hasil yang telah dirumuskan pada tahap-tahap terpenting dari pendidikan yang dijabarkan melalui visi dan misi pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan masyarakat dalam periode tertentu. Kebijakan pendidikan mencakup seluruh elemen sistem pendidikan, mulai dari Kementerian Pendidikan, pemerintah kabupaten/kota dan lembaga terkait, serta pendidikan yang memerlukan kebijakan penunjang berjenjang. Kebijakan ini mencakup semua bidang operasi pendidikan untuk pengambil keputusan di semua tingkatan. Dimana kebijakan pendidikan mendapat pengaruh dari tren perpolitikan negara, kebiasaan normatif, nilai-nilai serta konsep masadepan negara tersebut (Ali, 2017: 147).

Menurut Gamage dan Pang menjelaskan kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dari satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program.

### **2.2 Manajemen Kepala Madrasah**

Menurut Evans dalam bukunya *The Management and Control Quality* mendefinisikan manajemen adalah suatu proses sosial untuk menjamin partisipasi dan keterlibatan sejumlah orang dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya Maguard & Krone, mengungkapkan bahwa pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang kepala madrasah.

Manajemen menurut Tery & Rue, dikutip adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen sebagai suatu kemampuan yang selanjutnya menjadi cikal bakal suatu profesi. Manajemen adalah penerapan fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan pengawasan dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas maupun sumberdaya yang tersedia.

Manajemen kepala madrasah adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada usaha kepala madrasah dan bawahannya untuk mencapai tujuan madrasah yang sudah ditetapkan. Manajemen kepala madrasah adalah usaha kepala madrasah sebagai pemimpin untuk mempengaruhi orang lain (staf) agar ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui empat dasar kepemimpinan yaitu merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan memonitor

Tujuan manajemen kepala madrasah secara umum adalah: a) Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. b) Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. c) Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur prekrutan dan seleksi

yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terakit dengan kebutuhan organisasi dan individu. d) Mengembangkan praktik manajemen dan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. e) Menciptakan iklim kerja yang harmonis.

### **2.3. Tugas Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Manajemen kepala madrasah sangat menentukan keberhasilan madrasah dalam mempertahankan mutu. Pimpinan berasal dari kata pimpin yang berarti melaksanakan tugas-tugas kepala madrasah. Mengutip Veithzal Rivai Zainal, dkk (2013). mengutip pendapat sejumlah ahli bahwa kepala madrasah menurut: 1) Darvis and Filley, menjelaskan bahwa tugas kepala madrasah adalah seseorang (atau sekelompok orang) menduduki posisi manajemen atau mengerjakan pekerjaan memimpin, 2) Robert Tanenbaum menjelaskan bahwa tugas kepala madrasah adalah mereka yang menggunakan kewenangan formal untuk mengorganisasi, mengarahkan dan mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan organisasi.

## **3. Metodologi**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif baik secara individu maupun kelompok yang bertujuan sebagai analisis dan deskriptif suatu peristiwa, kejadian, aktifitas sosial, perilaku, keyakinan, pendapat, pemikiran masyarakat (Sukmadinata, 2017: 60). Analisis deskriptif adalah gaya analisis yang Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui proses pengeplorasi fakta dan data objek di lapangan sebagaimana adanya. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan data yang digali dari suatu proses pengamatan yang mendalam. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah bahwa terlebih dahulu peneliti mencari literatur atau teori yang berkaitan dengan penelitian, kemudian teori tersebut dibandingkan dengan kondisi lapangan penelitian.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1 Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani yaitu "*polis*" yang artinya kota. Analisis kebijakan pendidikan dapat dipahami baik melalui pendekatan metodologis maupun konseptual. Metodologi pada intinya merupakan keseluruhan proses yang secara sistematis dilakukan untuk melembagakan kebijakan dalam suatu sistem dan mekanisme yang institusional. Secara konseptual analisis kebijakan merupakan suatu ilmu perancangan sosial (*social engineering*) yang artinya ialah ilmu yang ditujukan untuk melahirkan manfaat dari konsep dan teori dalam berbagai disiplin ilmu sosial untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu kebijakan publik.

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik merupakan bagian dari keputusan politik, dimana keputusan tersebut menyangkut dan mempengaruhi masyarakat serta di fahami sebagai pilihan terbaik dari berbagai alternatif pilihan mengenai urusan publik yang menjadi kewenangan pemerintah (Kusumawati, 2019).

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkahlangkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Menurut Nurharjatmo, dengan modelnya merumuskan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan adalah; 1) standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, 2) tersedianya sumber daya, baik yang berupa dana, teknologi, sarana maupun prasarana lainnya, 3) komunikasi antara organisasi yang baik, 4) karakteristik birokrasi pelaksana, 5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Amin et al., 2019).

Ada beberapa aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan, diantaranya adalah: 1. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari kesatuan teori dan praktik 2. Kebijakan pendidikan mempunyai validitas perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu 3. Kebijakan pendidikan ditujukan pada kebutuhan peserta didik 4. Kebijakan pendidikan berkaitan

dengan penjabaran visi, misi dan tujuan pendidikan 5. Kebijakan pendidikan memiliki kejelasan tujuan untuk melahirkan pendidikan yang tepat.

Kebijakan pendidikan adalah suatu bentuk tindakan yang diambil atas beberapa pertimbangan, untuk mengarahkan manajer/kepala madrasah dalam menentukan masa depan madrasah sesuai dengan visi, misi pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan yang diinginkan (Mardlotillah, 2013).

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau reskonstruksi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **4.2 Mutu Pendidikan**

Mutu adalah pemenuhan terhadap kebutuhan stakeholde, bersistem pencegahan, mempunyai standar tanpa cacat dan mempunyai ukuran harga ketidakpuasan. Mutu dalam bidang pendidikan meliputi mutu input, output dan outcomes. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses, proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang pendidikan aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Output pendidikan dikatakan bermutu jika hasil belajar akademik maupun non akademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas ( Beerkens, 2018 ).

Berbicara mutu pendidikan berarti mengkaji keseluruhan dimensi pendidikan yang satu dengan yang lain saling terkait. Selain itu menentukan karakteristik atau ukuran untuk menunjukkan kualitas pendidikan yang sangat rumit, namun demikian beberapa indikator dapat digunakan sebagai rambu-rambu antara lain: prestasi belajar siswa, sarana dan prasarana yang mendukung, kualitas pengajar dan manajemen sekolah. Mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan secara internal maupun eksternal yang menunjukkan kemampuan yang memuaskan kebutuhan yang di harapkan atau yang tersirat mencakup input, proses, dan output pendidikan.

Total Quality Management dalam pendidikan adalah filosofi perbaikan terus menerus dimana lembaga pendidikan menyediakan seperangkat sarana atau alat untuk memenuhi bahkan melampaui kebutuhan, keinginan dan harapan stakeholder saat ini dan dimasa mendatang (Jabbar & Hussin, 2019). Dalam dunia pendidikan madrasah yang bermutu adalah madrasah yang menetapkan keberhasilan pada *proses, out put, dan out come*. Jika mutu pendidikan ingin dicapai maka siswa, guru, staf dan masyarakat harus bekerjasama untuk mewujudkan tujuan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka kita harus memperhatikan mengenai beberapa, Komponen-komponen: a) Siswa dan Guru b) Kurikulum c) Sarana dan prasarana pendidikan d) Pengelolaan madrasah, meliputi pengelolaan kelas, guru, siswa, sarana dan prasarana, peningkatan tata tertib dan kepemimpinan e) Pengelolaan proses pendidikan, meliputi penampilan guru, penguasaan materi, serta penggunaan strategi pendidikan f) Pengelolaan dana g) Evaluasi h) Kemitraan, meliputi hubungan madrasah dengan lembaga lain.

Peningkatan mutu madrasah menurut Sudarwan Danim (2013) melibatkan lima faktor: 1. Kepemimpinan Kepala madrasah yang efektif 2. Siswa, “anak sebagai pusat “sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali 3. Pelibatan guru secara maksimal. 4. Kurikulum yang tetap tetapi dinamis, sehingga tujuan mutu dapat dicapai 5. Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan madrasah dan masyarakat tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan/instansi 6. Pimpinan dan karyawan harus menjadi satu tim yang utuh (team-work) yang saling membutuhkan dan saling mengisi kekurangan yang ada sehingga target (goals) akan tercipta dengan baik. Untuk peningkatan aktivitas dan kreatifitas peserta didik, peningkatan disiplin belajar, kepala sekolah harus menerapkan beberapa langkah berikut ini : 1) Peningkatan aktivitas dan kreatifitas peserta didik, proses pendidikan pada hakekatnya untuk mengembangkan aktifitas dan kreatifitas peserta didik melalui berbagai interaksi peserta didik; 2) Peningkatan disiplin belajar, disiplin madrasah dapat diartikan sebagai keadaan tertib dimana guru, staf madrasah dan peserta didik bergabung dalam madrasah, tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan dengan senang hati; 3) Peningkatan motivasi belajar, mulyasa (2011) menyebutkan bahwa peserta didik akan belajar dengan

sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi. Dalam kaitannya dengan ini guru dituntut untuk memiliki kemampuan untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan belajar.

Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Mutu yang dimaksud dalam perspektif pendidikan adalah mutu dalam konsep relative, terutama berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua, yaitu: eksternal primer (peserta didik), eksternal sekunder (orang tua, pemimpin pemerintah, dan perusahaan) dan eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas).

Dari deskripsi tersebut dapatlah di pahami bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendaya gunakan sumber-sumber pendidikan dalam upaya mengubah tingkah laku anak didik untuk meningkatkan kemampuan yang di harapkan .

#### **4.3 Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan**

Dalam satuan pendidikan, menduduki dua jabatan penting untuk bisa menjamin kelangsungan proses pendidikan sebagaimana yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Pertama, kepala sekolah dalam pengelolaan pendidikan di sekolah secara keseluruhan. Kedua, Kepala Sekolah adalah pemimpin formal di sekolahnya (Lauen, D & Gaddis, 2016; Widodo, 2016).

Pemimpin harus mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, dapat mengoreksi kelemahan-kelemahan, dan sanggup membawa organisasi kepada sasaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadi, bisa dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan kunci kesuksesan sebuah organisasi. Di samping itu, dalam setiap kerja kolektif dibutuhkan pemimpin untuk mengefisienkan setiap langkah dari kegiatan tersebut (Hidayat & Machali, 2018; Muazza, Mukminin, Habibi, Hidayat, & Abidin, 2018).

Kepala sekolah sebagai pemimpin seharusnya dalam praktek sehari-hari selalu berusaha memperhatikan dan mempraktekkan tujuh fungsi kepemimpinan di dalam kehidupan sekolah (Irmayani et al., 2018). Mulyasa (2011) menjelaskan bahwa dalam paradigma baru manajemen pendidikan, kepala sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai educator, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator: 1) kepala sekolah sebagai edukator (pendidik); 2) kepala sekolah sebagai manajer; 3) kepala sekolah sebagai administrator; 4) kepala sekolah sebagai supervisor; 5) kepala sekolah sebagai leader; 6) kepala sekolah sebagai inovator; 7) kepala sekolah sebagai motivator

Sebagai seorang manajer tentunya harus memiliki berbagai keterampilan tertentu yaitu: 1) kemampuan mental untuk mengkoordinasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi; 2) keterampilan kemanusiaan, kemampuan bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain baik sebagai individu maupun kelompok; 3) keterampilan administratif, yaitu dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian dan pengawasan; dan 4) keterampilan teknik, yaitu kemampuan menggunakan peralatan, prosedur, teknik-teknik dari suatu bidang tertentu seperti mesin, dan sebagainya”

Kepala madrasah sebagai manajer pada intinya adalah melaksanakan fungsi manajemen, Manajemen adalah proses yang jelas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan potensi manusia dan sumber daya lainnya.

Beare dan Boyd (dalam Syafaruddin, 2008: 117) mengusulkan lima jenis kebijakan pendidikan diantaranya (1) Menetapkan tujuan dan target suatu madrasah; (2) mendistribusikan layanan serta sumber daya pendidikan, (3) Tentukan tujuan untuk pemberian layanan pendidikan, (4) tentukan layanan pendidikan yang akan diberikan, (5) Untuk menetapkan nilai kapitalisasi kualitas pendidikan guna mendorong perkembangan perekonomian. Dalam hal ini terdapat 3 tahapan yang meliputi perumusan, proses, dan penilaian, sehingga, kepala madrasah wajib merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan sebagai pejabat profesional.

Upaya-upaya lainya dalam meningkatkan kapabilitas madrasahny. Kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan harus mempunyai sikap yang loyalitas, integritas, dan komitmen. Adapun upaya yang dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan antara lain:

1. Loyalitas; hal yang harus dibangun oleh kepala madrasah bersama para guru dan staf, untuk mewujudkan suatu tujuan yang sesuai dengan visi misi sekolah, dengan adanya loyalitas yang dimiliki sehingga tujuan madrasah bisa dengan mudah tercapai.

2. Integritas; hal yang harus diwujudkan dalam suatu kepemimpinan, adalah integritas, dengan adanya integritas akan menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran.
3. Komitmen; suatu keadaan dimana seseorang membuat perjanjian (keterikatan), baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, begitulah yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin yang harus membangun komitmen bersama dengan bawahannya (Guru dan staf) untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan tujuan madrasah.

Ketiga hal tersebut harus diterapkan dalam suatu kepemimpinan guna untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena tanpa adanya loyalitas, integritas dan komitmen dalam menjalankan suatu kepemimpinan tentulah kepemimpinan itu tidak akan bisa mempunyai mutu yang berkualitas.

## 5. Kesimpulan

kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkahlangkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Mutu yang dimaksud dalam perspektif pendidikan adalah mutu dalam konsep relative, terutama berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua, yaitu: eksternal primer (peserta didik), eksternal sekunder (orang tua, pemimpin pemerintah, dan perusahaan) dan eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas).

Upaya Upaya Kepala Madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu menanamkan sikap kepemimpinan yang loyalitas, integritas dan komitmen dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu.

## Referensi

- Amin, M., Arsil, Fathurrochman, I., Bahri, S., & Rahmaningsih, S. (2019). *Manajemen Mutu Pendidikan Pada Perguruan Tinggi* (1st ed.). Rejang Lebong: LP2 IAIN Curup
- Asmoni. (2018). *Kebijakan Peningkatan Mutu Sekolah SMK*. Jakad Media Publishing
- Ali, Muhammad. (2017). *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Beerkens, M. (2018). Evidence-based policy and higher education quality assurance: progress, pitfalls and promise. *European Journal of Higher Education*, 8(3), 272–287.
- Hidayat, A., & Machali, I. (2018). *The Handbook of Education Management* (2nd ed.). Jakarta: Prenadamedia Group
- Irmayani, H., Wardiah, D., & Kristiawan., M. (2018). The strategy of SD Pusri in improving educational quality. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 7(7), 113–121
- Jabbar, M. N., & Hussin, F. (2019). Quality management as a strategic tool to enhance the relationship between leaders' behavior and lecturers' job satisfaction. *International Journal of Higher Education*, 8(3), 36–46.
- Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i1.794> . diakses tanggal 23 Mei 2023
- Manap, S. (2013). *Perencanaan Pendidikan* (1st ed.). Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Mardlotillah, F. (2013). Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Karakter melalui Program Pembiasaan Membaca Al-Qur'an. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 1(2), 150–155
- Mulyasa. (2011). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara

- Rusdiana. (2015). Kebijakan Pendidikan dari Filosofi Ke Implementasi. Bandung: Pustaka Setia
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12.
- Sukmadinata, N. S. (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syafaruddin, ( 2008 ) Efektifitas Kebijakan Pendidikan Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif (Jakarta: RinekaCipta),
- Widodo, H. (2016). Potret Pendidikan di Indonesia dan Kesiapannya dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). *Cendekia: Journal of Education and Society*, 13(2), 293.
- Zainal, Rivai Veithzal. ( 2013 ). *Islamic Management*. Yogyakarta: BPFE